

# MAMPU

# KITA

KABAR DARI KITA

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 2 / 2018 | MAR - APR

## Mitra MAMPU bertemu Presiden Joko Widodo tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan

Pada 21 April 2018 lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, 18 delegasi organisasi masyarakat sipil, termasuk di dalamnya enam Mitra MAMPU, diwakili oleh Ibu Zumrotin dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan Ibu Misiyah dari KAPAL Perempuan, perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), PEKKA, BAKTI dan Migrant CARE menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.



Ibu Zumrotin dari YKP menyampaikan paparan kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang mengusulkan perubahan usia minimum perkawinan dari semula 16 tahun menjadi minimum 18 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise yang turut hadir sangat mendukung usulan tersebut. Menurut beliau, perubahan ini penting untuk mengatasi tingginya tingkat perkawinan anak (kurang dari 18 tahun) di Indonesia yang mencapai 25 – 40 persen. Di samping Perppu Pencegahan Perkawinan Anak, para delegasi turut menyampaikan usulan tentang percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PK-S), di mana keduanya merupakan alat hukum negara yang diharapkan dapat membangun perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan akan berdampak dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut para delegasi menyampaikan kemendesakan pengesahan kedua peraturan tersebut karena akan berkontribusi pada program wajib belajar 12 tahun, pengurangan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, pengurangan kekerasan terhadap perempuan, peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan, dan pencegahan perdagangan manusia. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan turut mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB), yaitu 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5) Kesetaraan gender; dan 10) Berkurangnya kesenjangan.

## Kementerian Agama bekerja sama dengan Pesada-PERMAMPU Cegah Pernikahan Anak di Nias Barat

Pertengahan April lalu, Pesada-PERMAMPU melalui dukungan Program MAMPU, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kabupaten Nias Barat menandatangani Nota Kesepakatan untuk bekerja sama mendorong pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Kesepakatan ini merupakan salah satu langkah tindak lanjut dari hasil penelitian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang menemukan rendahnya pengetahuan perempuan mengenai kesehatan reproduksi di wilayah tersebut. Komitmen dititikberatkan pada usaha advokasi untuk mencegah perkawinan anak serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan di Kabupaten Nias Barat.

"Selama ini keluarga, tokoh masyarakat dan adat lebih banyak mengontrol remaja daripada memberikan pengetahuan yang mereka butuhkan," ungkap Fenueli Hia, Koordinator Wilayah Pesada untuk Nias dan Tapanuli Tengah. Pesada-PERMAMPU telah membangun kerja sama dengan Dinas Kesehatan, pemberi obat tradisional (pembatras), dan gereja sejak tahun 2017. Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga, khususnya perempuan dan remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi mereka melalui penyuluh kesehatan.



Pdt. Novrita Tatuhas (Kanwil Kemenag) dan Fenueli Hia (PESADA) menyatakan kesepakatan kerja sama secara simbolis.

"Kerjasama antara Pesada dengan Kemenag mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi pengetahuan tentang HKSR termasuk KB dan pernikahan anak." Tutar Ermansyah Polem, Kasubag TU Kanwil Kemenag Kabupaten Nias Barat. "Tahun lalu, di Nias Barat, tercatat 10 Angka Kematian Ibu. Kedepannya tidak ada lagi ibu yang meninggal saat melahirkan." Tutupnya.

*Ke depannya tidak ada lagi ibu yang meninggal saat melahirkan.*

- Kanwil Kemenag Kab. Nias Barat

## Institut KAPAL Perempuan Sampaikan Hasil Pemantauan JKN-PBI di Kantor Staf Presiden

MAMPU dampingi Institut KAPAL Perempuan memaparkan hasil pemantauan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran

Selasa (10 April 2018) lalu, Institut KAPAL Perempuan memenuhi undangan Kantor Staf Presiden untuk mempresentasikan hasil pemantauan program Jaminan Kesehatan Nasional-Penerima Bantuan Iuran (JKN-PBI). Pemantauan telah dilaksanakan pada Oktober 2017-Januari 2018 di Kec. Jatinegara Kaum (DKI Jakarta), Kab. Gresik (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), dan Kab. Pangkajene dan Kepulauan (Sulawesi Selatan).

Hasil pemantauan yang melibatkan 1.311 responden dan 74 tim komunitas pemantau ini turut menunjukkan, meski data kepesertaan JKN maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 88, 1%, sosialisasi kegunaan kartu oleh BPJS masih minim. Salah satu dampaknya adalah ketidaktahuan 87% responden bahwa kartu JKN-PBI dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi.

“Kami mendesak BPJS agar menjalankan tanggung jawabnya, dan membuat terobosan-terobosan untuk membuat desain sosialisasi yang mudah dipahami, lengkap, dan dapat menjangkau komunitas terpencil, wilayah sulit di pesisir, kepulauan, maupun pegunungan,” tegas Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan.



Sejumlah anggota Sekolah Perempuan, dan perwakilan Institut KAPAL Perempuan berfoto bersama Deputy IV Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Eko Sulistyio.



Ibu Nurhayati (Sekolah Perempuan) menyerahkan tanda mata hasil kerajinan tangan anggota Sekolah Perempuan Sulawesi Selatan kepada Bapak Eko Sulistyio (KSP).

## Program MAMPU dan Kedutaan Australia Sumbanghi Pekerja Rumahan di Surabaya

Pada 18 April 2018, Kedutaan Australia dan Program MAMPU mengunjungi wilayah kerja Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) di Surabaya. Kunjungan ini menjadi ruang bagi kelompok perempuan dan mitra pelaksana program untuk berbagi pengalaman dalam mendorong inisiatif di tingkat lokal dalam pemberdayaan perempuan.

Pertemuan pembuka berlangsung di Kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dihadiri oleh Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Dinas Tenaga Kerja Surabaya serta para pekerjarumahan binaan MWPRI wilayah Surabaya.



Ibu Cecilia (MWPRI) menyampaikan paparan di depan perwakilan Pemda, MAMPU dan DFAT.

Pemerintah Kecamatan Rungkut membuka acara dengan menyambut baik adanya Program MAMPU di wilayahnya serta menjelaskan sangat berkembangnya industri kecil di wilayah Surabaya.

Kemudian dilanjutkan oleh MWPRI menjabarkan kegiatan pemberdayaan seperti pengenalan dengan kerja layak, keterampilan berorganisasi, dan perlindungan kerja para pekerjarumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan di Kecamatan Rungkut ini menjadi awal kerjasama yang baik antara MWPRI, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta Dinas Tenaga Kerja wilayah Surabaya untuk bersama-sama mencari jalan keluar bagi isu-isu sekitar pekerja rumahan.

Kunjungan dilanjutkan dengan kunjungan melihat para pekerja rumahan Kelompok Bunga Sakura binaan MWPRI di Desa Kali Rungkut. Mayoritas pekerja rumahan kelompok ini bekerja membuat souvenir pesta, salah satunya Nyumiatur. Ia bekerja menggulung handuk kecil yang dibungkus cantik menjadi souvenir pesta. Upahnya Rp.10.000 per 100 buah. Umumnya Nyumiatur mendapat pesanan kurang lebih 300-400 buah souvenir. MWPRI mendorong para pekerja rumahan untuk membentuk kelompok untuk saling menguatkan.

“Setelah ada kelompok, saya jadi punya tempat untuk berbagi mengeluarkan keluhan pekerjaan. Kami berharap ke depannya pekerja rumahan ini dianggap. Kami juga ingin kesejahteraan kami juga diperhatikan.” Ungkap Nyumiatur sembari menggulung handuk untuk pesanan hari itu.

*“Setelah ada kelompok, saya jadi punya tempat untuk berbagi mengeluarkan keluhan pekerjaan.”*

- Nyumiatur, Pekerja Rumahan.



## MAMPU Mendukung Kerja Kolektif Mitra untuk Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia, MAMPU dan para mitranya melakukan berbagai kerja kolektif yang bersifat multipihak di tingkat daerah maupun nasional.

Bersama International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan sejumlah mitra lainnya, MAMPU mengembangkan proyek percontohan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB di enam lokasi. Sepanjang Maret 2018 lalu, keenam lokasi ini telah mengadakan konsultasi publik maupun sosialisasi RAD TPB.

### 6 Lokasi Proyek Percontohan Penyusunan RAD-TPB Program MAMPU



"Pembentukan Tim Koordinasi TPB di Kabupaten Cirebon melibatkan multi-pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat sipil dan media," papar Dewi Ririn, Koordinator Wilayah Program MAMPU-'Aisyiyah Jawa Barat, dalam acara Sosialisasi RAD TPB Kab. Cirebon, Kamis (22 Maret 2018) lalu.

Selain itu, di tingkat nasional, Ketua YKP Zumrotin K. Susilo dan Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo turut didaulat menjadi anggota Panitia Pengarah Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional TPB.

"TPB merupakan tujuan nasional yang dikukuhkan dengan Perpres Nomor 59/2017. Agar TPB tercapai, semua pihak harus bekerja bersama dalam satu visi, tidak bisa 'business as usual'," pesan Zumrotin dalam Dialog Kebijakan SDGs yang diadakan INFID, Selasa (27 Maret 2018) lalu.

## Suara dari Desa

Mendengar cerita dari pemimpin daerah tentang keberhasilan model DESBUMI di Jember.



"Sebelum DESBUMI, pemerintah desa kesulitan untuk melindungi warganya yang bekerja sebagai buruh migran karena selama ini, pemerintah desa hanya menandatangani dokumen tanpa mengetahui informasi lengkap migrasi warga. Ironisnya, setiap ada

problem yang menimpa warga kami di luar negeri, pemerintah desa pasti terlibat menuntaskan masalah tersebut.

Namun setelah ada DESBUMI, kami dapat menandatangani dokumen warga yang akan bermigrasi setelah kami yakin tidak ada persoalan dalam dokumen tersebut.

Tak hanya itu pemerintah desa sekarang juga bisa berbuat lebih untuk memberdayakan mantan buruh migran kembalinya dari negeri rantau, karena pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk melakukan program-program pemberdayaan tersebut." Tukas Miftahul Munir – Kepala Desa Dukuh Dempok, Jember, Jawa Timur ketika menghadiri acara monitoring Program MAMPU di Jawa Timur hari Kamis, 19 April 2018.

Beliau ungkapkan perasaannya selama mengikuti DESBUMI. DESBUMI adalah kumpulan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran ke berbagai layanan di tingkat desa. Migrant CARE mengembangkan konsep ini didukung oleh program MAMPU. Dalam operasinya, DESBUMI memastikan bahwa para migran dan keluarganya memiliki akses ke berbagai layanan mulai dari panduan tentang opsi bermigrasi dan hak buruh migran, penanganan kasus dan rujukan ketika kesulitan muncul ketika berada di luar negeri, hingga pelatihan keterampilan pasca migrasi.



Bapak Miftahul Munir, Kepala Desa Dukuh Dempok menyampaikan hasil pemantauan dan capaian program DESBUMI di wilayahnya.

## Capaian Membanggakan P2TP2A di Tana Toraja

Selama enam bulan terakhir, Tana Toraja mencatat sejumlah perkembangan menggembirakan terkait dengan layanan P2TP2A yang ikut didukung Mitra MAMPU, Yayasan Kombongan Situru. Beberapa capaian membanggakan tersebut adalah:



Mendorong advokasi PERDA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.



Pembentukan Lembaga P2TP2A dengan SK. Bupati Tana Toraja Nomor 13/V/tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tana Toraja.



Mendorong dan membantu fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) untuk membuat Renstra. Renstra kemudian diuji lewat konsultasi public dan berhasil menjadikan Renstra DP3A menjadi contoh untuk OPD terkait.



Adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) P2TP2A untuk penanganan kasus yang disahkan oleh Kepala Dinas PP-PA (DP3A).



Dialokasikannya anggaran di P2TP2A untuk 4 counsellor dan anggaran untuk visum gratis.

## Integrasi Layanan P2TP2A dan SLRT di Kabupaten Sleman

Sinergi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kabupaten Sleman, Yogyakarta telah mulai terlihat dalam beberapa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terutama KdRT yang juga dilayani oleh SLRT. Dengan demikian perlindungan sosial juga menjadi salah satu layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan baik dalam layanan medis (jamkesmas/BPJS) maupun reintegrasi sosial.

Sinergi juga terlihat dengan adanya rujukan pengaduan kasus KdRT dari SLRT ke UPTD P2TP2A. Dan sebaliknya, UPTD P2TP2A juga telah beberapa kali merujuk penanganan perlindungan sosial bagi korban kekerasan ke SLRT Kabupaten Sleman.

Namun, sinergi layanan ini belum terintegrasi dalam SoP layanan di masing-masing lembaga baik di SLRT dan di UPTD P2TP2A Kabupaten Sleman. Melalui fasilitasi Program MAMPU, pada tanggal 22 Maret 2018 diadakan pertemuan Integrasi Layanan P2TP2A dan SLRT di Kantor DP3AP2KB Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh Dinas Sosial, Dinas P3APPKB, Forum Pengada Layanan dan perwakilan Program MAMPU.

Melalui pertemuan ini UPTD P2TP2A dan SLRT Kabupaten Sleman sepakat untuk meningkatkan sinergi layanan dengan cara:

- 1 Melakukan penyesuaian SoP layanan dimasing-masing lembaga melalui review bersama dan penyesuaian;
- 2 Meningkatkan koordinasi dan pemahaman kader PKDRT dan Satgas PPA di Desa milik UPTD P2TP2A dengan fasilitator dan puskesmas yang dimiliki SLRT tentang layanan P2TP2A dan SLRT serta sinergi antar keduanya;
- 3 Menetapkan 2 kecamatan dan desa lokasi uji coba sinergi layanan UPTD P2TP2A dengan SLRT yakni di Kecamatan Sleman dan Ngaglik.
- 4 Menyelenggarakan pertemuan lanjutan untuk mereview masing-masing SoP layanan dan kemudian dilakukan penyesuaian tentang sinergi layanan rujukan antara UPTD P2TP2A dengan SLRT Kab Sleman.

## Pengenalan Reses Partisipatif di Yogyakarta

Pada tanggal 21 - 22 Maret 2018 Mitra Program MAMPU, Forum Pengada Layanan (FPL) mengadakan workshop Pengenalan Reses Partisipatif untuk Penguatan Dukungan Kebijakan Lokal dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Yogyakarta. Workshop ini dibuka secara resmi oleh Team Leader Program MAMPU Ibu Kate Shanahan dan dihadiri oleh perwakilan dari Suara Parangpungan, PUPA Bengkulu, Yayasan CIQAL serta anggota DPRD Kabupaten Sleman, Minahasa Selatan, dan Kota Bengkulu. Ikut memfasilitasi workshop ini Yayasan BaKTI dan Anggota DPRD Kabupaten Maros sebagai narasumber.

Workshop ini melahirkan komitmen dari 3 orang anggota DPRD Yogyakarta berupa rencana tindak lanjut bersama mitra FPL untuk mengenalkan konsep reses partisipatif di wilayah masing-masing.



Ibu Fitriyani, Anggota DPRD Kabupaten Maros menjadi narasumber dalam workshop pengenalan reses partisipatif.

## Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:  
Website: [www.mampu.or.id](http://www.mampu.or.id)  
Twitter: @ProgramMAMPU  
Email: [info@mampu.or.id](mailto:info@mampu.or.id)

**MAMPU**

Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan